



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Mohammad Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21207 Faksimile (0756) 21924

Laman <https://dpp.pesisirselatankab.go.id> Pos-el dpp@pesisirselatankab.go.id

K E P U T U S A N KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 000.7/8/DPP-PS/2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029

DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Dinas Perikanan dan Pangan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Jangka menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang spesifik, relevan dan terukur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026; Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 184 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KEDUA merupakan acuan kinerja yang dipergunakan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan:
1. Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Penetapan Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
 3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
 4. Evaluasi Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
 5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.;
- KETIGA : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 13 Maret 2026

Kepala Dinas Perikanan dan Pangan,



ANDI SYAFINAL, S.Pi., M.Si
NIP. 19761006 200312 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.7/8/DPP-PS/2026
TANGGAL : 13 Maret 2026
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERIKANAN
DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021-2026

I. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

PEJABAT : ESSELON II

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Meningkatkan a Kualitas Akuntabilitas Dinas Perikanan dan Pangan	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	81,60	81,75	81,94	82,18	82,47	83
	2. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	80	81	82	83	84	85
2. Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Skor Pola Pangan Harapan	88,5	88,7	88,9	89,2	89,5	89,7
3. Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kot a	62.000	63.304,20	64.482,37	65.711,87	67.225,34	69.213,86

PEJABAT : ESSELON III

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	1. Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah	0,13	0,18	0,23	0,29	0,35	0,64
	2. Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Jumlah Inovasi	1	1	1	1	1	1
2. Meningkatkan	1. Persentase Jumlah Cadangan	20	40	60	80	100	100

Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	2. Pangan 2. Persentase Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Meningkatkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Persentase Ketersediaan Energi (%) 2. Persentase Ketersediaan Protein (%) 3. Persentase Konsumsi Energi 4. Persentase Konsumsi Protein	2.500 70 98% 96%	2.600 72 98,5% 97%	2.650 73 98,8% 98%	2.650 75 99% 99%	2.700 75 99,20% 100%	2.700 75 99,20% 100%
4. Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	30%	25%	20%	15%	10%	5%
5. Meningkatkan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	6,30%	8,70%	11,20%	13,70%	16,30%	16,30%
6. Meningkatkan Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	15.478,05	15.725,70	15.977,31	16.232,95	16.492,68	16.893,75
7. Meningkatkan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	46.522	47.263,50	48.016,82	48.782,15	49.559,68	50.760,45
8. Meningkatkan Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	1. Angka Konsumsi Ikan 2. Produksi Olahan Hasil Perikanan	35,64 209,99	35,69 324,99	35,73 488,24	35,78 756,77	35,83 1.172,99	35,83 1.559,66

KINERJA OPERASIONAL

SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Optimalnya Administrasi Palayaan Umum dan Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	100	100	100	100	100	100
2. Optimalnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Dinas	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	17	16	16	16	16	17

Perikanan dan Pangan							
3. Optimalnya Administrasi Keuangan Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah dokumen Laporan Realisasi Keuangan	12	12	12	12	12	12
4. Optimalnya Penanganan Kerawanan Pangan	- Jumlah Rumah Tangga Rawan Pangan yang ditangani	70	75	80	85	90	95
	- Jumlah Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan yang tersedia	1	1	1	1	1	1
4. Optimalnya Pengelolaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	- Jumlah Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan	35	36	37,00	37,00	40,00	40
	- Jumlah gerakan pangan murah yang dilaksanakan	15	15	15,00	15,00	15,00	15
5. Optimalnya Pengawasan Keamanan Pangan	- Jumlah Usaha yang mendapatkan rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten	5	7	9,00	11,00	13,00	13
6. Optimalnya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase keragaman konsumsi pangan per kelompok pangan: Umbi-umbian Protein Hewani Kacang-kacangan Sayur dan Buah	1,564% 10,490% 2,233% 5,850%	1,569% 10,633% 2,246% 5,880%	1,573% 10,777% 2,260% 5,910%	1,578% 10,923% 2,273% 5,940%	1,582% 11,071% 2,286% 5,971%	1,586% 11,075% 2,290% 6,000%
9. Optimalnya Pengelolaan Nelayan Kecil	- Jumlah laporan data dan informasi Perikanan Tangkap	1	1	1	1	1	1
10. Optimalnya Pemberdayaan Nelayan Kecil	- Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat kapasitasnya	130	135	140	145	150	160
	- Jumlah Kelompok nelayan yang memperoleh fasilitas pembentukan kelembagaan dan	20	20	20	20	20	20

	kemitraan usaha						
11. Optimalnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	- Jumlah Pengujian Keamanan Hasil Perikanan bagi usaha mikro dan kecil	1	1	1,00	1,00	1,00	1
	-Jumlah Rekomendasi SKP Produk Unit Usaha/Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	2	2	2,00	2,00	2,00	2
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan yang tersedia	5	5	5,00	5,00	5,00	5
12. Optimalnya Pemberdayaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	- Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang memperoleh pembinaan dan pelatihan teknis	50	50	50,00	50,00	50,00	50,00
	- Jumlah Pengolahan ikan yang mendapatkan fasilitas pengolahan ikan	50	100	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Jumlah promosi hasil perikanan dalam rangka pencapaian Angka Konsumsi Ikan	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00
13. Optimalnya Pengelolaan Pembudidaya Ikan	- Jumlah Pembudidaya ikan yang meningkat pendapatannya	50	50	50	50	50	50
	-Jumlah luas pemanfaatan lahan budidaya	10	10	10	10	10	10
	- Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	5.660.525	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Jumlah Pengujian Kualitas Air pada Kelompok Budidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1
14. Optimalnya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses & informasi/dan iptek	50	50	50	50	50	50

	dan penguatan kelembagaan)						
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

II. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Pembangunan sektor Perikanan dan Pangan diperlukan penyamaan persepsi terhadap sasaran Dinas Perikanan dan Pangan, maka setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) dijelaskan menggunakan definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/ pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- Formulasi : Hasil penilaian Inspektorat Daerah
- Sumber data : Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
- Penanggung jawab : Dinas Perikanan dan Pangan

2. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.
- Formulasi : Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA
- Sumber data : Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri
- Penanggung jawab : Dinas Perikanan dan Pangan

3. Skor Pola Pangan Harapan

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Susunan pangan yang beragam didasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu

		dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah skor pph}}{\text{Jumlah skor maksimum}} \times 100\%$
Sumber data	:	Data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS)
Penanggung jawab	:	Dinas Perikanan dan Pangan

4. Jumlah Total Produksi Perikanan

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Total produksi perikanan dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten/Kota
Formulasi	:	$\text{Produksi Perikanan Tangkap} + \text{Produksi Perikanan Budidaya} + \text{Produksi Olahan Perikanan}$
Sumber data	:	Dinas Perikanan dan Pangan
Penanggung jawab	:	Dinas Perikanan dan Pangan

5. Nilai Kematangan Inovasi

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.
Formulasi	:	Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA
Sumber data	:	Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri
Penanggung jawab	:	Dinas Perikanan dan Pangan

6. Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Persentase peningkatan nilai AKIP.
Formulasi	:	$\frac{\text{Nilai AKIP tahun n} - \text{Nilai AKIP tahun n-1}}{\text{Nilai AKIP tahun n}} \times 100\%$
Sumber data	:	Sekretariat Dinas Perikanan dan Pangan.
Penanggung jawab	:	Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan

7. Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
---------------------	---	------------------

Definisi Operasional	:	Persentase capaian fisik dan keuangan yang dicapai Bidang dan Sekretariat
Formulasi	:	Hasil Pengukuran Aplikasi Simbangda
Sumber data	:	Sekretariat Dinas Perikanan dan Pangan
Penanggung jawab	:	Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan

8. Jumlah Inovasi

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Jumlah Inovasi yang dirumuskan pada Dinas Perikanan dan Pangan
Formulasi	:	Jumlah Inovasi yang disusun
Sumber data	:	Sekretariat Dinas Perikanan dan Pangan
Penanggung jawab	:	Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan

9. Persentase Jumlah Cadangan Pangan

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Untuk mengetahui tingkat kesiapan dan ketahanan daerah dalam menghadapi potensi krisis pangan. Cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota adalah stok pangan pokok (beras) yang disiapkan dan dikelola oleh Pemerintah kabupaten/kota untuk antisipasi keadaan darurat, gejolak harga, atau keadaan tertentu guna menjamin ketersediaan dan stabilitas pangan.
Formulasi	:	<i>Target Jumlah Cadangan Pangan * 100%</i>
Sumber data	:	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

10. Persentase Wilayah Tahan Pangan

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Rasio daerah tahan pangan terhadap total daerah
Formulasi	:	$\frac{\text{Nagari Tahan Pangan}}{\text{Jumlah Total Nagari}} \times 100\%$
Sumber data	:	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

11. Angka Ketersediaan Energi

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Ketersediaan pangan utama untuk dikonsumsi dengan jumlah penduduk.
Formulasi	:	$KSPE = \frac{ktsp}{P \times 365 \text{ hari}}$ KSPE : Ketersediaan energi (Kkal/Kap/hari) KTSP : Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi manusia(Ton/Tahun)

P : Jumlah Penduduk
Sumber data : Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
Penanggung jawab : Kepala Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan

12. Persentase Ketersediaan Energi

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Ketersediaan pangan utama untuk dikonsumsi dengan jumlah penduduk.
Formulasi :
$$KSPp = \frac{kspp}{P \times 365 \text{ hari}}$$

KSPp : Ketersediaan Protein Pangan
(Gr/Kap/hari)
P : Jumlah Penduduk

Sumber data : Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
Penanggung jawab : Kepala Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan

13. Persentase Konsumsi Energi

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Perbandingan antara banyaknya energi yang dikonsumsi (kalori) terhadap kecukupan energi dalam satuan %AKG.
Formulasi :
$$\frac{\text{Konsumsi energi}}{\text{Angka kecukupan energi}} \times 100\%$$

Sumber data : Data susenas BPS Provinsi Sumatera Barat.
Penanggung jawab : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

14. Persentase Konsumsi Protein

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Perbandingan antara banyaknya protein yang dikonsumsi terhadap kecukupan energi dalam satuan %AKG.
Formulasi :
$$\frac{\text{Konsumsi protein}}{\text{Angka kecukupan protein}} \times 100\%$$

Sumber data : Data susenas BPS Provinsi Sumatera Barat.
Penanggung jawab : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

15. Persentase Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang aktif

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Persentase Gapoktan LPM yang aktif
Formulasi :
$$(\text{Jumlah LPM} / \text{Jumlah LPM yg aktif}) \times 100\%$$

Sumber data : Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Penanggung jawab : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

16. Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
- Definisi Operasional : Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan merupakan kondisi yang mencerminkan tingkat capaian kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan berdasarkan data pengawasan post market (pengambilan contoh dan pengujian) dan pre market (registrasi/sertifikasi/surveilan)
- Formulasi : $PSAT = \frac{a}{b} \times 100\%$
- a = jumlah sampel yang memenuhi syarat keamanan pangan
b = jumlah total sampel yang diambil
- Sumber data : Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
- Penanggung jawab : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

17. Produksi Perikanan Tangkap

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
- Definisi Operasional : Jumlah Produksi yang berasal dari aktivitas perikanan tangkap di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan di Indonesia dalam berat basah
- Formulasi : Jumlah Hasil Tangkapan
- Sumber data : Bidang Pemberdayaan Nelayan
- Penanggung jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan.

18. Produksi Perikanan Budidaya

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
- Definisi Operasional : Produksi Perikanan Budi Daya adalah semua hasil pembudidayaan yang dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan di wilayah Kabupaten/Kota.
- Formulasi : Total volume produksi dihitung dalam bentuk berat basah ikan hasil budidaya.
- Sumber data : Bidang Perikanan Budidaya
- Penanggung jawab : Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

19. Angka Konsumsi Ikan

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
- Definisi Operasional : Mengukur rata-rata jumlah ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam satu

wilayah selama satu tahun, yang dihitung dalam satuan kilogram/kapita/tahun di Kabupaten/Kota.

Formulasi : $Angka_{KI} = Angka_{KRT} + Angka_{KLRT} + Angka_{KTT}$ Angka_{KI} :
Angka konsumsi ikan
Angka_{KRT} : Angka konsumsi rumah tangga
Angka_{KLRT} : Angka konsumsi luar rumah tangga
Angka_{KTT} : Angka konsumsi tidak tercatat

Sumber data : Bidang Pemberdayaan Nelayan
Penanggung jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

20. Produksi Olahan Hasil Perikanan

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Berat produk hasil pengolahan bahan baku ikan menjadi produk pangan untuk konsumsi manusia

Formulasi : Jumlah Olahan Perikanan yang diproduksi
Sumber data : Bidang Pemberdayaan Nelayan
Penanggung jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

21. Jumlah Rumah Tangga Rawan Pangan yang ditangani

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : total pengelolaan penanganan Nagari Rawan Pangan

Formulasi : $(\text{Jumlah Daerah Rawan Pangan} / \text{Jumlah Daerah yang tertangani}) \times 100\%$
Sumber data : Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Penanggung jawab : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

22. Jumlah Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan yang tersedia

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Dokumen Analisa Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan yang disusun

Formulasi : Jumlah dokumen FSVA yang tersedia
Sumber data : Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Penanggung jawab : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

23. Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Formulasi : Cadangan Pangan Masyarakat + Cadangan Pangan Pemerintah
Sumber data : Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Penanggung jawab : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

24. Jumlah Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Lumbung Pangan Masyarakat yang melaksanakan peningkatan kapasitas
Formulasi : Jumlah LPM yang melaksanakan peningkatan kapasitas
Sumber data : Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Penanggung jawab : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

25. Jumlah gerakan pangan murah yang dilaksanakan

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : upaya pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama di daerah yang rawan pangan
Formulasi : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan GPM
Sumber data : Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Penanggung jawab : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

26. Jumlah Usaha yang mendapatkan rekomendasi Keamanan Pangan

Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Jumlah rekomendasi yang diterbitkan dalam rangka menjamin keamanan pangan segar yang beredar melalui inspeksi, pengambilan contoh, monitoring dan pengujian
Formulasi : Jumlah rekomendasi
Sumber data : Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
Penanggung jawab : Kepala Bidang Konsumsi Keamanan Pangan

27. Jumlah laporan data dan informasi Perikanan Tangkap

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Jumlah laporan data yang disusun pada tahun berjalan
Formulasi : Jumlah Data Perikanan Tangkap
Sumber data : Bidang Pemberdayaan Nelayan
Penanggung jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

28. Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat kapasitasnya

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Total individu nelayan yang telah mendapatkan intervensi peningkatan kompetensi atau pemberian akses sumber daya.
Formulasi : Akumulasi nelayan yang mengikuti peningkatan kapasitas

Sumber data : Bidang Pemberdayaan Nelayan
Penanggung jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

29. Jumlah Kelompok nelayan yang memperoleh fasilitas pembentukan kelembagaan dan kemitraan usaha

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Total kelompok nelayan (Kelompok Usaha Bersama/KUB) yang telah menerima pendampingan formal dan fasilitasi untuk memperkuat status hukum organisasi dan memperluas jaringan pasar atau permodalan dalam satu tahun anggaran.
Formulasi : Jumlah Kelompok yang mendapatkan fasilitasi
Sumber data : Bidang Pemberdayaan Nelayan
Penanggung jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan nelayan

30. Jumlah Pengujian Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Mikro dan Kecil

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : total frekuensi atau unit sampel hasil perikanan milik pelaku usaha mikro dan kecil yang dilakukan pengujian laboratorium untuk memastikan pemenuhan standar kesehatan ikan, mutu, dan keamanan
Formulasi : Jumlah sampel/paket pengujian yang difasilitasi
Sumber data : Bidang Pemberdayaan Nelayan
Penanggung jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

31. Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan berusaha

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Total satuan unit usaha/kelompok pengolah dan pemasar yang telah menerima intervensi pembinaan teknis, manajerial, atau pendampingan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.
Formulasi : Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran ikan ikan yang mendapatkan pembinaan.
Sumber data : Bidang Pemberdayaan Nelayan
Penanggung jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

32. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan yang tersedia

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Total sarana dan prasarana fasilitas pendukung aktivitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
Formulasi : Jumlah penyediaan sarana dan prasarana

pengolahan hasil perikanan
Sumber data : Bidang Pemberdayaan Nelayan
Penanggung jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

33. Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Banyaknya satuan unit usaha (perorangan atau kelompok) pengolah dan pemasar yang mengikuti serangkaian kegiatan peningkatan kapasitas melalui transfer pengetahuan dan keterampilan praktis (*skill*).
Formulasi : Jumlah Unit Usaha yang mendapatkan pelatihan teknis
Sumber data : Bidang Pemberdayaan Nelayan
Penanggung jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

34. Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Total frekuensi pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai manfaat mengonsumsi ikan serta pengenalan produk perikanan kepada masyarakat luas yang bertujuan untuk meningkatkan minat konsumsi protein hewani asal ikan
Formulasi : Jumlah Kegiatan promosi yang dilaksanakan
Sumber data : Bidang Pemberdayaan Nelayan
Penanggung jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

35. Jumlah Pembudidaya ikan yang meningkat pendapatannya

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Jumlah Pembudidaya yang mengalami kenaikan pendapatan
Formulasi : Jumlah pembudidaya yang meningkat pendapatannya
Sumber data : Bidang Perikanan Budidaya
Penanggung jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

36. Jumlah luas pemanfaatan lahan budidaya

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Pertambahan Luas Lahan yang digunakan untuk usaha budidaya ikan
Formulasi : Jumlah pertambahan luas lahan
Sumber data : Bidang Perikanan Budidaya
Penanggung jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

37. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Produksi benih budidaya air tawar dan air

payau yang yang dihasilkan

Formulasi : Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi BBI dan UPR

Sumber data : Bidang Perikanan Budidaya

Penanggung jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

38. Jumlah Pengujian Kualitas Air pada Kelompok Budidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Pengambilan sampel air pada kelompok untuk diuji kualitas airnya

Formulasi : Jumlah dokumen Pengujian Kualitas Air

Sumber data : Bidang Perikanan Budidaya

Penanggung jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

39. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses & informasi/dan iptek dan penguatan kelembagaan)

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Anggota Pokdakan dan Anggota UPR yang mengikuti pelatihan, penyuluhan dan pendampingan

Formulasi : Jumlah Anggota Pokdakan dan Anggota UPR yang mengikuti pelatihan, penyuluhan dan pendampingan

Sumber data : Bidang Perikanan Budidaya

Penanggung jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

KEPALA
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ANDI SYAFINAL, S.Pi., M.Si
NIP. 19761006 200312 1 003